

Keterlibatan Opinion Leader dalam Penanganan Masalah Sampah di Kota Banjarmasin: Analisis Peran Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Influencer Digital

Opinion Leader's Involvement in Handling Waste Problems in Banjarmasin City: An Analysis of the Role of Religious Leaders, Community Leaders, and Digital Influencers

Fahrianoor¹, Muhammad Nizar Hidayat², Enly Hadiyanor³

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia¹

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia²

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk keterlibatan opinion leader dalam penanganan masalah sampah di Kota Banjarmasin, mengidentifikasi pola komunikasi yang digunakan, serta menelaah faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peran mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan opinion leader masih bersifat terbatas dan sporadis. Tokoh agama dan tokoh masyarakat cenderung menggunakan pendekatan komunikasi yang halus dan tersirat karena pertimbangan kultural, sehingga pesan pengelolaan sampah kurang disampaikan secara konsisten dan terstruktur. Di sisi lain, relawan lingkungan dan influencer digital memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran publik, namun jangkauan pengaruhnya dibatasi oleh keterbatasan sumber daya, jejaring sosial yang terfragmentasi, serta minimnya dukungan institusional. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tingkat kesadaran masyarakat terhadap masalah sampah dan partisipasi aktif dalam tindakan kolektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi peran opinion leader memerlukan penguatan jejaring sosial lintas komunitas, strategi komunikasi yang sensitif terhadap konteks budaya lokal, serta integrasi yang lebih kuat antara aktor informal dan kebijakan pemerintah daerah.

Kata kunci: opinion leader¹, komunikasi lingkungan², partisipasi publik³, pengelolaan sampah⁴, Banjarmasin⁵

Abstract

This study aims to examine the involvement of opinion leaders in addressing solid waste management issues in Banjarmasin City, to identify the communication strategies they employ, and to analyze factors influencing the effectiveness of their roles. This research adopts a qualitative case study approach. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis, and were analyzed using thematic analysis with source triangulation. The findings reveal that the involvement of opinion leaders remains limited and sporadic. Religious and community leaders tend to adopt subtle and implicit communication approaches due to cultural

considerations, resulting in inconsistent and unstructured dissemination of waste management messages. Meanwhile, environmental volunteers and digital influencers contribute to raising public awareness; however, their impact is constrained by limited resources, fragmented social networks, and insufficient institutional support. These findings indicate a gap between public awareness of waste-related problems and active participation in collective action. This study concludes that optimizing the role of opinion leaders requires strengthening cross-community social networks, developing culturally sensitive communication strategies, and enhancing integration between informal actors and local government policies in order to foster more sustainable and participatory waste management practices.

Keywords: *opinion leaders¹, environmental communication², public participation³, solid waste management⁴, Banjarmasin⁵*

PENDAHULUAN

Permasalahan pengelolaan sampah merupakan isu lingkungan yang semakin mendesak di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Kota Banjarmasin. Kota yang dikenal dengan julukan “Kota Seribu Sungai” ini menghadapi tantangan lingkungan yang kompleks akibat peningkatan produksi sampah rumah tangga yang tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang memadai. Sampah yang menumpuk di kawasan permukiman, bantaran sungai, dan ruang publik tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan dan degradasi lingkungan yang berkelanjutan (Amelia, 2024; Muhaimin & Jumriani, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan sampah di Banjarmasin telah berkembang menjadi persoalan struktural yang melibatkan dimensi sosial, budaya, dan perilaku masyarakat.

Situasi pengelolaan sampah di Banjarmasin semakin memburuk setelah penutupan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih pada awal tahun 2025. Penutupan tersebut mengakibatkan ratusan ton sampah tidak terangkut setiap harinya dan memicu penumpukan sampah di berbagai titik kota (Yulianus, 2025b). Krisis ini memperlihatkan keterbatasan kapasitas sistem pengelolaan sampah yang ada serta lemahnya kesiapan kota dalam menghadapi gangguan pada infrastruktur utama pengolahan limbah. Meskipun terjadi pergantian kepemimpinan dan berbagai upaya telah dilakukan, permasalahan sampah tetap menjadi isu kronis yang belum tertangani secara tuntas (Bagian Pembangunan Setdako Banjarmasin, 2025; Yulianus, 2025a). Hal ini mengindikasikan bahwa solusi teknis dan kebijakan formal saja belum cukup untuk menyelesaikan persoalan sampah secara berkelanjutan.

Berbagai program telah diluncurkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, salah satunya melalui Gerakan Gaya Hidup Sadar Sampah yang menekankan perubahan perilaku warga dalam mengurangi, memilah, dan mengelola sampah dari sumbernya (Bagian Pembangunan Setdako Banjarmasin, 2025). Selain itu, pembentukan bank sampah dan kegiatan edukasi lingkungan

juga terus digalakkan di tingkat kelurahan. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program lingkungan sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat. Rendahnya keterlibatan warga dalam praktik pengelolaan sampah menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai norma sosial dalam kehidupan sehari-hari (Maulidya et al., 2021; Muhaimin & Jumriani, 2023).

Dalam konteks ini, keterlibatan aktor sosial non-formal menjadi semakin penting. Opinion leader yang meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis komunitas, serta figur berpengaruh di media sosial memiliki posisi strategis dalam membentuk opini publik dan memengaruhi perilaku kolektif. Sejumlah studi menunjukkan bahwa opinion leader memiliki kemampuan untuk menjembatani pesan kebijakan dengan masyarakat akar rumput melalui komunikasi yang lebih persuasif, kontekstual, dan berbasis kedekatan emosional (Jaya & Silviani, 2020; Manopo, 2013). Dalam isu lingkungan, pengaruh opinion leader menjadi krusial karena perubahan perilaku tidak dapat dipaksakan hanya melalui regulasi, tetapi memerlukan legitimasi sosial dan keteladanan.

Penelitian mengenai peran opinion leader telah banyak dilakukan dalam berbagai konteks, seperti peningkatan partisipasi masyarakat dalam program lingkungan, penguatan komunikasi bank sampah, serta dorongan terhadap perilaku ramah lingkungan dan konsumsi hijau (Islamy & Engriani, 2025; Maulidya et al., 2021; Pesuwaryantoro, 2025). Studi lain juga menyoroti peran opinion leader digital dalam menyuarakan isu krisis iklim dan lingkungan melalui aktivisme daring (Hasna, 2025). Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa opinion leader dapat berfungsi sebagai agen perubahan yang efektif, terutama ketika mereka memiliki kredibilitas sosial dan akses terhadap jejaring komunikasi yang luas. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji peran opinion leader dalam konteks krisis pengelolaan sampah perkotaan yang bersifat laten dan berkelanjutan, khususnya di Kota Banjarmasin.

Konteks sosial dan kultural masyarakat Banjarmasin menambah kompleksitas persoalan ini. Dalam budaya lokal, pendekatan komunikasi yang bersifat menggurui atau terlalu instruktif cenderung kurang diterima. Oleh karena itu, pesan-pesan sosial lebih efektif ketika disampaikan secara halus, simbolik, dan berbasis nilai moral atau religius. Hal ini sejalan dengan temuan Setiawan dan Arli serta Ramadaniar et al. yang menunjukkan bahwa pengaruh opinion leader, khususnya tokoh agama, dapat memperkuat intensi perilaku ramah lingkungan ketika pesan dikaitkan dengan nilai spiritual dan etika sosial (Ramadaniar et al., 2024; Setiawan & Arli, 2024). Namun, efektivitas pendekatan tersebut sangat bergantung pada konsistensi pesan dan integrasinya dengan praktik nyata di tingkat komunitas.

Di sisi lain, berbagai kajian menunjukkan bahwa masyarakat perkotaan sering kali mengalami kesenjangan antara kesadaran terhadap masalah lingkungan dan keterlibatan dalam tindakan kolektif. Fenomena ini dikenal sebagai *collective action problem*, di mana individu menyadari adanya masalah bersama, tetapi enggan bertindak karena menganggap tanggung jawab utama berada pada pemerintah (Muhaimin & Jumriani, 2023; Swandayani & Juariyah, 2019). Dalam situasi seperti ini, opinion leader memiliki potensi untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan membangun norma sosial baru dan mendorong partisipasi berbasis komunitas. Namun, peran ini tidak selalu berjalan optimal apabila tidak didukung oleh jejaring sosial yang terintegrasi dan dukungan kelembagaan yang memadai (Rifani et al., 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut penelitian ini berfokus pada analisis bentuk keterlibatan opinion leader, strategi komunikasi yang digunakan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peran mereka dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian komunikasi lingkungan dan opinion leadership, sementara secara praktis diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih partisipatif dan berkelanjutan di Kota Banjarmasin.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam keterlibatan opinion leader dalam penanganan masalah sampah di Kota Banjarmasin. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada eksplorasi makna, praktik komunikasi, serta dinamika sosial dan kultural yang melandasi perilaku para aktor sosial dalam konteks pengelolaan sampah perkotaan. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menelaah fenomena secara holistik dalam konteks nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks sosialnya tidak dapat dipisahkan secara tegas (Cresswell, 2017).

Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan pertimbangan bahwa kota ini tengah mengalami krisis pengelolaan sampah yang signifikan pasca penutupan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih. Kondisi tersebut menjadikan Banjarmasin sebagai konteks empiris yang relevan untuk mengkaji peran aktor non-formal dalam mendorong partisipasi masyarakat dan perubahan perilaku lingkungan. Penelitian ini berfokus pada praktik komunikasi dan keterlibatan opinion leader dalam konteks sosial perkotaan yang memiliki karakteristik budaya lokal yang kuat.

Subjek penelitian terdiri atas opinion leader yang memiliki pengaruh sosial dalam isu lingkungan, meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis

komunitas lingkungan, serta influencer lokal yang aktif di media sosial. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan informan pendukung dari unsur pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria utama berupa tingkat pengaruh sosial, keterlibatan dalam aktivitas lingkungan, serta pengakuan dari komunitas setempat. Teknik ini dipandang tepat karena memungkinkan peneliti memilih informan yang paling relevan dengan tujuan penelitian (Crano et al., 2014).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pandangan, pengalaman, serta strategi komunikasi opinion leader dalam menyuarakan isu pengelolaan sampah. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya dan mendalam mengenai motivasi, pertimbangan kultural, serta persepsi informan terhadap partisipasi masyarakat. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas kampanye lingkungan, pertemuan komunitas, kegiatan keagamaan, serta aksi sosial yang melibatkan opinion leader. Observasi ini bertujuan untuk menangkap praktik komunikasi aktual dan interaksi sosial yang tidak selalu terungkap melalui wawancara (Cresswell, 2017).

Selain itu, telaah dokumentasi dilakukan terhadap berbagai materi komunikasi yang relevan, seperti unggahan media sosial, poster kampanye lingkungan, dokumentasi kegiatan komunitas, serta berita media daring. Analisis dokumentasi ini penting untuk memahami bagaimana pesan lingkungan dikonstruksikan dan disebarkan melalui berbagai saluran komunikasi, baik formal maupun informal. Kombinasi ketiga teknik pengumpulan data tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan kontekstual mengenai fenomena yang diteliti.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis diawali dengan reduksi data, yaitu memilah dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dikodekan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan bentuk keterlibatan opinion leader, strategi komunikasi, hambatan struktural dan kultural, serta respons masyarakat. Tahap berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk narasi tematik yang memungkinkan peneliti melihat pola, hubungan antar tema, dan dinamika sosial yang muncul. Analisis dilakukan secara iteratif dan simultan dengan proses pengumpulan data, sehingga peneliti dapat menyesuaikan fokus penelitian sesuai dengan temuan lapangan (Miles et al., 2014).

Untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan

beberapa strategi validasi. Pertama, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan dan teknik pengumpulan data. Kedua, member checking dilakukan dengan meminta konfirmasi kepada informan utama terkait ringkasan hasil wawancara atau interpretasi awal yang disusun peneliti. Ketiga, diskusi antar anggota tim peneliti dilakukan secara berkala untuk memastikan konsistensi analisis dan meminimalkan bias subjektif. Langkah-langkah ini sejalan dengan prinsip validitas dalam penelitian kualitatif yang menekankan keterpercayaan dan transparansi proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Aktual Pengelolaan Sampah di Kota Banjarmasin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin berada dalam situasi yang rentan dan kompleks, terutama setelah penutupan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih pada awal tahun 2025. Penutupan TPAS tersebut berdampak langsung pada terganggunya sistem pengangkutan dan pembuangan sampah, sehingga terjadi penumpukan sampah di berbagai wilayah kota, termasuk kawasan permukiman padat penduduk, ruang publik, dan bantaran sungai. Observasi lapangan yang dilakukan peneliti memperlihatkan bahwa tumpukan sampah tidak hanya terjadi secara insidental, tetapi berlangsung dalam waktu yang relatif lama dan berulang, mencerminkan keterbatasan kapasitas sistem pengelolaan sampah yang ada.

Secara kuantitatif, Kota Banjarmasin menghasilkan ratusan ton sampah setiap harinya, dan gangguan pada sistem pengelolaan pasca penutupan TPAS Basirih menyebabkan sebagian besar sampah tersebut tidak terangkut secara optimal. Kondisi ini dikonfirmasi oleh berbagai laporan media yang menyebutkan bahwa ratusan ton sampah sempat tertahan dan menumpuk di sejumlah titik kota (Yulianus, 2025b). Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa keterlambatan pengangkutan sampah berdampak pada meningkatnya keluhan masyarakat, terutama terkait bau tidak sedap, pencemaran lingkungan, serta menurunnya kenyamanan dan kualitas hidup warga.

Permasalahan sampah di Banjarmasin tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Wawancara dengan warga di beberapa lokasi penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menyadari bahwa kondisi sampah telah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Penumpukan sampah di bantaran sungai menjadi perhatian khusus, mengingat sungai memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Banjarmasin. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Amelia (2025) dan Muhaimin dan Jumriani (2023) yang menegaskan bahwa permasalahan sampah

rumah tangga di kawasan sungai tidak hanya mencerminkan lemahnya pengelolaan, tetapi juga rendahnya kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan (Amelia, 2024; Muhaimin & Jumriani, 2023).

Meskipun pemerintah daerah telah merespons situasi ini dengan menetapkan status darurat sampah dan meluncurkan berbagai kebijakan jangka pendek, temuan penelitian menunjukkan bahwa respons tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi akar persoalan. Sejumlah informan menyampaikan bahwa kebijakan yang diambil masih bersifat reaktif dan berfokus pada penanganan jangka pendek, seperti penumpukan sementara dan pengalihan lokasi pembuangan, tanpa diiringi dengan strategi perubahan perilaku masyarakat secara sistematis. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa persoalan sampah di Banjarmasin merupakan masalah struktural yang memerlukan pendekatan lintas sektor dan partisipatif (Sukhrowardi, 2025).

Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab pemerintah semata. Persepsi ini tercermin dari minimnya praktik pemilahan sampah dari sumber dan rendahnya keterlibatan warga dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis komunitas. Padahal, pemerintah daerah telah berupaya mendorong perubahan perilaku melalui program Gerakan Gaya Hidup Sadar Sampah yang menekankan pengurangan dan pengelolaan sampah sejak dari rumah tangga (Bagian Pembangunan Setdako Banjarmasin, 2025). Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa program tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik sehari-hari masyarakat.

Tingkat dan Bentuk Keterlibatan Opinion Leader

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan opinion leader dalam penanganan masalah sampah di Kota Banjarmasin telah hadir dalam berbagai bentuk, namun tingkat intensitas dan konsistensinya masih relatif terbatas. Opinion leader yang teridentifikasi dalam penelitian ini mencakup tokoh agama, tokoh masyarakat di tingkat lokal, aktivis atau relawan lingkungan, serta influencer digital. Keempat kelompok ini memiliki peran dan pola keterlibatan yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh posisi sosial, ruang komunikasi yang dimiliki, serta pertimbangan kultural dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Tokoh agama merupakan salah satu kelompok opinion leader yang memiliki legitimasi sosial tinggi di tengah masyarakat. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian tokoh agama menyadari pentingnya isu kebersihan dan pengelolaan sampah sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan. Namun, keterlibatan mereka umumnya bersifat tidak langsung dan simbolik. Pesan terkait pengelolaan sampah kerap disisipkan dalam ceramah atau pengajian dalam bentuk nasihat umum tentang kebersihan, tanpa secara

eksplisit mengarahkan jamaah pada tindakan konkret seperti pemilahan sampah atau pengurangan penggunaan plastik. Pola ini sejalan dengan temuan Ramadaniar et al. (2024) dan Setiawan dan Arli (2024) yang menunjukkan bahwa tokoh agama cenderung mengaitkan pesan lingkungan dengan nilai spiritual, tetapi tidak selalu menurunkannya ke dalam praktik teknis yang spesifik.

Tokoh masyarakat di tingkat lokal, seperti ketua RT atau figur informal yang berpengaruh di lingkungan permukiman, menunjukkan bentuk keterlibatan yang lebih bersifat praktis. Beberapa tokoh masyarakat terlibat dalam mengorganisasi kerja bakti, mengajak warga menjaga kebersihan lingkungan, atau memfasilitasi komunikasi dengan pihak kelurahan. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa aktivitas ini umumnya bersifat insidental dan tidak berkelanjutan. Keterlibatan tokoh masyarakat sering kali meningkat ketika kondisi sampah sudah dianggap mengganggu, kemudian menurun setelah masalah sementara teratasi. Pola ini mencerminkan keterbatasan kapasitas dan dukungan struktural yang dimiliki tokoh masyarakat dalam menggerakkan partisipasi warga secara konsisten (Manopo, 2013).

Aktivis dan relawan lingkungan menunjukkan tingkat keterlibatan yang relatif lebih tinggi dibandingkan kelompok opinion leader lainnya. Mereka aktif melakukan kampanye lingkungan, aksi bersih-bersih, serta edukasi langsung kepada masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa jangkauan pengaruh relawan masih terbatas pada komunitas tertentu. Keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk pendanaan, tenaga, maupun akses media, menjadi faktor utama yang membatasi perluasan dampak kegiatan mereka. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Maulidya et al. (2021) dan Rifani et al. (2022) yang menegaskan bahwa inisiatif berbasis komunitas membutuhkan dukungan kelembagaan agar dapat berjalan berkelanjutan dan menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas (Maulidya et al., 2021; Rifani et al., 2022).

Sementara itu, influencer digital memiliki pola keterlibatan yang berbeda. Penelitian ini menemukan bahwa influencer lokal cenderung aktif menyuarakan isu sampah ketika masalah tersebut menjadi sorotan publik, terutama melalui unggahan visual dan kritik di media sosial. Keterlibatan ini terbukti mampu meningkatkan perhatian publik dalam jangka pendek. Namun, keterlibatan influencer bersifat temporal dan tidak konsisten. Setelah isu sampah tidak lagi menjadi topik utama percakapan daring, intensitas unggahan dan advokasi cenderung menurun.

Strategi dan Pola Komunikasi Opinion Leader

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dan pola komunikasi yang digunakan oleh opinion leader dalam menyampaikan isu pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan kultural

masyarakat setempat. Secara umum, opinion leader cenderung menghindari pendekatan komunikasi yang bersifat langsung, instruktif, atau mengandung unsur pemaksaan. Sebaliknya, pesan-pesan terkait pengelolaan sampah disampaikan melalui strategi persuasif yang halus, simbolik, dan kontekstual, dengan tujuan menjaga penerimaan sosial dan menghindari resistensi dari masyarakat.

Pada kelompok tokoh agama, strategi komunikasi yang dominan adalah penyampaian pesan secara tersirat melalui narasi moral dan nilai-nilai religius. Pesan tentang kebersihan lingkungan kerap dikaitkan dengan ajaran agama mengenai kebersihan sebagai bagian dari iman, tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, atau etika menjaga ciptaan Tuhan. Strategi ini dinilai lebih dapat diterima oleh jamaah dibandingkan penyampaian pesan teknis tentang pengelolaan sampah. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa pendekatan tersebut jarang disertai dengan ajakan konkret atau panduan praktis yang jelas, sehingga dampaknya lebih kuat pada tataran kesadaran normatif daripada perubahan perilaku nyata. Pola ini sejalan dengan temuan Setiawan dan Arli (2024) serta Ramadaniar et al. (2024) yang menekankan bahwa pengaruh spiritual dan moral efektif dalam membentuk sikap, tetapi memerlukan penguatan lanjutan untuk mendorong tindakan berkelanjutan.

Tokoh masyarakat di tingkat lokal menggunakan strategi komunikasi yang lebih bersifat interpersonal dan situasional. Komunikasi dilakukan melalui interaksi langsung, seperti percakapan informal dengan warga, pertemuan lingkungan, atau ajakan dalam kegiatan kerja bakti. Pesan yang disampaikan umumnya sederhana dan praktis, misalnya ajakan menjaga kebersihan lingkungan sekitar atau tidak membuang sampah sembarangan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa pesan tersebut jarang disampaikan secara terencana dan berulang. Ketiadaan strategi komunikasi yang sistematis menyebabkan pesan mudah dilupakan dan hanya efektif dalam jangka pendek. Temuan ini menguatkan pandangan Manopo (2013) bahwa efektivitas komunikasi opinion leader sangat bergantung pada konsistensi dan keberlanjutan pesan.

Aktivis dan relawan lingkungan cenderung menggunakan strategi komunikasi edukatif dan partisipatif. Mereka menyampaikan pesan melalui kampanye langsung, diskusi kelompok, pelatihan pemilahan sampah, serta aksi bersih lingkungan yang melibatkan masyarakat. Strategi ini memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara relawan dan warga, sehingga pesan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya membuat relawan sulit mempertahankan intensitas komunikasi dalam jangka panjang. Pesan-pesan edukatif sering kali hanya menjangkau kelompok masyarakat yang sudah

memiliki kepedulian awal terhadap isu lingkungan, sementara kelompok lain yang kurang responsif belum tersentuh secara optimal. Pola ini selaras dengan temuan Maulidya et al. (2021) yang menyoroti keterbatasan jangkauan komunikasi komunitas bank sampah.

Sementara itu, influencer digital memanfaatkan media sosial sebagai saluran utama komunikasi. Strategi yang digunakan umumnya bersifat visual dan emosional, seperti menampilkan kondisi tumpukan sampah, menyampaikan kritik terhadap pemerintah, atau mengajak pengikut untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Strategi ini terbukti efektif dalam menarik perhatian publik dan memicu percakapan daring dalam waktu singkat. Namun, penelitian ini menemukan bahwa komunikasi influencer jarang diikuti dengan ajakan yang terstruktur atau tindak lanjut yang jelas. Selain itu, intensitas komunikasi sangat bergantung pada tren dan momentum isu. Pola ini sejalan dengan temuan Hasna (2025) dan Hidayat et al. (2024) yang menunjukkan bahwa aktivisme digital sering kali bersifat temporer dan kurang terhubung dengan aksi kolektif di tingkat komunitas.

Persepsi dan Respons Masyarakat terhadap Pesan Opinion Leader

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kota Banjarmasin secara umum memiliki tingkat kesadaran yang cukup tinggi terhadap permasalahan sampah yang terjadi di lingkungannya. Kesadaran ini terutama dipicu oleh pengalaman langsung warga yang merasakan dampak penumpukan sampah, seperti bau tidak sedap, pencemaran sungai, dan menurunnya kualitas lingkungan permukiman. Wawancara dengan warga di beberapa lokasi penelitian memperlihatkan bahwa isu sampah dipersepsikan sebagai persoalan serius yang mengganggu kenyamanan hidup sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan hasil kajian Amelia (2025) serta Muhaimin dan Jumriani (2023) yang menegaskan bahwa masyarakat bantaran sungai dan kawasan padat penduduk sangat rentan terhadap dampak negatif pengelolaan sampah yang buruk.

Meskipun kesadaran terhadap masalah sampah relatif tinggi, respons masyarakat terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh opinion leader menunjukkan pola yang beragam dan cenderung belum berujung pada tindakan kolektif yang berkelanjutan. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar warga menerima pesan opinion leader secara normatif, terutama ketika pesan tersebut disampaikan oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat yang mereka hormati. Pesan-pesan tentang kebersihan lingkungan umumnya dipandang sebagai ajakan moral yang baik dan relevan dengan nilai-nilai sosial serta keagamaan. Namun, penerimaan tersebut lebih banyak berhenti pada tataran sikap dan persetujuan, tanpa diikuti oleh perubahan perilaku yang signifikan.

Respons masyarakat terhadap pesan tokoh agama, misalnya, cenderung

bersifat pasif. Warga mengakui bahwa pesan yang disampaikan dalam ceramah atau pengajian menumbuhkan rasa bersalah atau kesadaran moral, tetapi tidak selalu mendorong tindakan konkret seperti memilah sampah atau mengurangi penggunaan plastik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pesan yang bersifat simbolik dan implisit lebih efektif membangun kesadaran, tetapi kurang kuat dalam mendorong perubahan perilaku praktis. Temuan ini sejalan dengan Setiawan dan Arli (2024) yang menyatakan bahwa pengaruh religius dan spiritual mampu membentuk niat, namun memerlukan penguatan struktural agar dapat diwujudkan dalam tindakan nyata.

Pada tingkat komunitas, respons masyarakat terhadap ajakan tokoh masyarakat dan relawan lingkungan menunjukkan kecenderungan yang lebih aktif, namun masih bersifat situasional. Warga relatif antusias mengikuti kegiatan kerja bakti atau aksi bersih lingkungan yang difasilitasi oleh tokoh lokal. Akan tetapi, partisipasi tersebut sering kali bersifat sementara dan bergantung pada kehadiran figur penggerak. Ketika kegiatan selesai atau tidak lagi difasilitasi, partisipasi masyarakat cenderung menurun. Pola ini menunjukkan bahwa partisipasi belum terinternalisasi sebagai kebiasaan kolektif, melainkan masih bergantung pada dorongan eksternal. Temuan ini sejalan dengan Maulidya et al. (2021) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan lingkungan berbasis komunitas sering kali bersifat episodik.

Respons masyarakat terhadap pesan influencer digital juga menunjukkan karakteristik yang khas. Konten media sosial yang menampilkan kondisi krisis sampah atau kritik terhadap pemerintah daerah mampu menarik perhatian dan memicu diskusi di ruang daring. Namun, penelitian ini menemukan bahwa interaksi tersebut jarang diterjemahkan menjadi tindakan nyata di tingkat komunitas. Sebagian warga memandang konten tersebut hanya sebagai informasi atau hiburan, tanpa merasa terdorong untuk terlibat secara langsung.

Peran Komunitas dan Relawan Lingkungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas dan relawan lingkungan memainkan peran penting dalam upaya penanganan masalah sampah di Kota Banjarmasin, terutama pada tingkat akar rumput. Kelompok-kelompok ini muncul sebagai respons atas keterbatasan sistem pengelolaan sampah formal dan meningkatnya keresahan masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Relawan lingkungan umumnya terdiri atas warga yang memiliki kepedulian tinggi terhadap isu lingkungan dan secara sukarela menginisiasi berbagai kegiatan, seperti kampanye kebersihan, aksi bersih-bersih lingkungan, edukasi pemilahan sampah, serta pendampingan pembentukan bank sampah di tingkat lokal.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa aktivitas komunitas dan relawan lingkungan relatif lebih terstruktur dibandingkan keterlibatan opinion leader

lainnya. Beberapa komunitas memiliki agenda rutin, seperti kerja bakti mingguan atau kegiatan edukasi di sekolah dan lingkungan permukiman. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya penanganan sampah secara langsung, tetapi juga sebagai media komunikasi lingkungan yang efektif karena melibatkan masyarakat secara aktif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Maulidya et al. (2021) yang menekankan bahwa komunikasi lingkungan berbasis komunitas mampu meningkatkan kepedulian dan partisipasi warga melalui pendekatan partisipatif dan interaksi langsung.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa jangkauan pengaruh komunitas dan relawan lingkungan masih terbatas. Aktivitas mereka cenderung terkonsentrasi pada wilayah atau komunitas tertentu yang sudah memiliki tingkat kepedulian awal terhadap isu lingkungan. Kelompok masyarakat yang kurang peduli atau memiliki kesadaran lingkungan rendah relatif jarang tersentuh oleh aktivitas relawan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun relawan memiliki kapasitas untuk mendorong perubahan perilaku, pengaruh mereka belum mampu menjangkau masyarakat secara luas dan merata. Temuan ini sejalan dengan Rifani et al. (2022) yang menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah berbasis komunitas sangat dipengaruhi oleh dukungan sistem dan jejaring yang lebih luas.

Keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama yang dihadapi oleh komunitas dan relawan lingkungan. Wawancara dengan para relawan menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan dijalankan dengan dana swadaya dan mengandalkan kontribusi sukarela anggota. Keterbatasan dana berdampak pada minimnya sarana pendukung, seperti alat kebersihan, media kampanye, dan fasilitas pengangkutan sampah lanjutan. Selain itu, keterbatasan tenaga dan waktu juga memengaruhi konsistensi kegiatan, terutama ketika relawan harus membagi perhatian dengan pekerjaan utama mereka. Kondisi ini memperlihatkan bahwa semangat voluntarisme yang tinggi belum diimbangi dengan dukungan struktural yang memadai.

Relasi antara komunitas relawan dan pemerintah daerah juga menunjukkan dinamika yang belum optimal. Beberapa relawan mengakui adanya kerja sama informal dengan aparat kelurahan atau dinas terkait, misalnya dalam penyediaan alat kebersihan atau dukungan kegiatan tertentu. Namun, kerja sama tersebut belum terbangun secara sistematis dan berkelanjutan. Ketidadaan mekanisme koordinasi yang jelas menyebabkan banyak inisiatif komunitas berjalan sendiri tanpa integrasi dengan program pemerintah. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa peran komunitas akan lebih efektif apabila didukung oleh kebijakan dan fasilitasi yang berkesinambungan (Swandayani & Juariyah, 2019).

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa relawan lingkungan memiliki potensi besar untuk berperan sebagai opinion leader di tingkat komunitas.

Melalui keteladanan dan keterlibatan langsung, relawan mampu membangun kepercayaan dan memengaruhi perilaku warga di sekitarnya. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan karena keterbatasan akses terhadap media yang lebih luas dan minimnya pelatihan komunikasi strategis. Tanpa dukungan tersebut, pesan-pesan lingkungan yang disampaikan relawan cenderung berhenti pada lingkup komunitas kecil dan sulit berkembang menjadi gerakan yang lebih luas.

Peran Influencer Digital dalam Isu Sampah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer digital memiliki peran yang semakin menonjol dalam membentuk wacana publik terkait permasalahan sampah di Kota Banjarmasin, khususnya melalui media sosial. Influencer yang teridentifikasi dalam penelitian ini umumnya merupakan figur lokal yang memiliki jumlah pengikut cukup besar dan aktif menyuarakan isu-isu sosial dan lingkungan. Kehadiran mereka menjadi signifikan terutama pada saat krisis sampah mencapai puncaknya, seperti setelah penutupan TPAS Basirih, ketika isu penumpukan sampah menjadi perbincangan luas di ruang publik daring.

Influencer digital memanfaatkan platform media sosial sebagai saluran utama komunikasi, dengan mengandalkan konten visual dan narasi emosional untuk menarik perhatian publik. Unggahan berupa foto atau video tumpukan sampah, kondisi bantaran sungai yang tercemar, serta kritik terhadap kinerja pemerintah daerah menjadi bentuk komunikasi yang paling sering digunakan. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan visibilitas isu sampah dan memicu diskusi di kalangan pengguna media sosial. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hasna (2025) yang menunjukkan bahwa aktivisme digital mampu memperluas jangkauan isu lingkungan dan membangun kesadaran publik dalam waktu singkat.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peran influencer digital cenderung bersifat temporer dan sangat bergantung pada momentum isu. Intensitas unggahan dan advokasi biasanya meningkat ketika isu sampah sedang ramai diperbincangkan, kemudian menurun secara signifikan ketika perhatian publik beralih ke isu lain. Pola ini mengindikasikan bahwa keterlibatan influencer lebih berorientasi pada pembentukan opini dan perhatian publik jangka pendek, dibandingkan dengan upaya mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan hasil studi Hidayat, Fahrianoor, dan Siswanto (2024) yang menunjukkan bahwa media sosial efektif dalam meningkatkan kesadaran dan respons awal masyarakat, tetapi memiliki keterbatasan dalam membangun aksi kolektif jangka panjang.

Respons masyarakat terhadap pesan influencer digital juga menunjukkan karakteristik yang khas. Warga yang aktif di media sosial cenderung merespons

unggahannya melalui komentar, tanda suka, atau membagikan ulang konten tersebut. Namun, penelitian ini menemukan bahwa interaksi daring tersebut jarang diterjemahkan menjadi keterlibatan langsung dalam kegiatan pengelolaan sampah di tingkat komunitas. Sebagian informan mengakui bahwa mereka merasa prihatin setelah melihat konten influencer, tetapi tidak mengetahui langkah konkret apa yang dapat dilakukan setelahnya. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam desain pesan influencer yang belum terhubung dengan ajakan tindakan yang jelas dan terstruktur.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa influencer digital jarang berkolaborasi secara intensif dengan aktor lain, seperti tokoh masyarakat, relawan lingkungan, atau pemerintah daerah. Ketiadaan kolaborasi ini menyebabkan pesan-pesan yang disampaikan influencer berdiri sendiri dan tidak terintegrasi dengan program atau kegiatan pengelolaan sampah yang ada. Padahal, integrasi antara advokasi digital dan aksi lapangan berpotensi memperkuat dampak perubahan perilaku masyarakat. Temuan ini memperkuat pandangan Pesuwaryantoro (2025) yang menekankan pentingnya peran key opinion leader dalam mengarahkan partisipasi publik menuju tindakan konkret melalui desain komunikasi yang terhubung dengan sistem dan fasilitas yang tersedia.

Meskipun memiliki keterbatasan, peran influencer digital tetap menunjukkan potensi strategis dalam isu pengelolaan sampah. Influencer mampu menjangkau kelompok masyarakat, khususnya generasi muda, yang mungkin sulit dijangkau melalui saluran komunikasi konvensional. Dengan kemampuan membangun narasi yang menarik dan mudah disebarluaskan, influencer digital berpotensi menjadi penguat pesan lingkungan apabila dikombinasikan dengan strategi komunikasi yang berkelanjutan dan kolaboratif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Islamy dan Engriani (2025) yang menunjukkan bahwa pengaruh key opinion leader dapat mendorong niat perilaku ramah lingkungan ketika disertai dengan kepercayaan dan pesan yang konsisten.

Hambatan Kelembagaan dan Fragmentasi Jejaring

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan kelembagaan dan fragmentasi jejaring sosial merupakan faktor kunci yang membatasi efektivitas keterlibatan opinion leader dalam penanganan masalah sampah di Kota Banjarmasin. Meskipun berbagai aktor—pemerintah daerah, tokoh masyarakat, relawan lingkungan, dan influencer digital—telah melakukan upaya penanganan, aktivitas tersebut cenderung berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dalam suatu kerangka kolaborasi yang sistematis. Kondisi ini menyebabkan potensi sinergi antar aktor belum dimanfaatkan secara optimal.

Dari sisi kelembagaan, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme koordinasi antara pemerintah daerah dan aktor non-formal masih lemah. Beberapa informan menyampaikan bahwa komunikasi antara dinas terkait dan komunitas lingkungan umumnya bersifat ad hoc dan bergantung pada inisiatif personal. Tidak terdapat forum atau platform resmi yang secara rutin mempertemukan pemerintah dengan opinion leader dan komunitas untuk merumuskan strategi bersama dalam pengelolaan sampah. Akibatnya, berbagai inisiatif yang muncul di tingkat masyarakat sering kali tidak terhubung dengan kebijakan dan program pemerintah yang ada. Temuan ini memperkuat pandangan Swandayani dan Juariyah (2019) bahwa lemahnya koordinasi kelembagaan dapat menghambat efektivitas pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat.

Fragmentasi jejaring sosial juga terlihat jelas dalam hasil penelitian ini. Setiap kelompok opinion leader cenderung bergerak dalam lingkarannya masing-masing. Tokoh agama beroperasi dalam jaringan jamaah, tokoh masyarakat di lingkungan permukiman, relawan lingkungan dalam komunitas terbatas, dan influencer digital di ruang daring. Minimnya interaksi lintas jaringan menyebabkan pesan-pesan pengelolaan sampah tidak saling menguatkan dan hanya menjangkau segmen masyarakat tertentu. Kondisi ini sejalan dengan pendekatan jejaring sosial yang menekankan bahwa pengaruh sosial akan lebih kuat apabila terdapat aktor penghubung (*bridging actors*) yang mampu menjembatani berbagai kelompok sosial (Crano, Brewer, & Lac, 2014).

Penelitian ini juga menemukan bahwa ketiadaan dukungan kelembagaan berdampak langsung pada keberlanjutan kegiatan komunitas dan relawan lingkungan. Banyak inisiatif berbasis masyarakat bergantung pada semangat sukarela dan sumber daya terbatas. Ketika dukungan pemerintah tidak tersedia secara konsisten, kegiatan tersebut sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa peran opinion leader dan komunitas tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya sistem pendukung yang memadai. Temuan ini sejalan dengan Rifani et al. (2022) yang menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berbasis komunitas memerlukan dukungan sistem informasi, fasilitas, dan kebijakan agar dapat berjalan efektif.

Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi adanya perbedaan persepsi antar aktor mengenai tanggung jawab pengelolaan sampah. Pemerintah cenderung menekankan aspek teknis dan regulatif, sementara opinion leader dan komunitas lebih fokus pada perubahan perilaku dan kesadaran masyarakat. Perbedaan orientasi ini tidak selalu diikuti dengan upaya penyelarasan tujuan dan strategi, sehingga menciptakan kesenjangan dalam implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, opinion leader belum sepenuhnya difungsikan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjembatani kebijakan dengan praktik sosial di

tingkat komunitas.

Fragmentasi jejaring dan hambatan kelembagaan juga memengaruhi efektivitas komunikasi lingkungan. Pesan-pesan yang disampaikan oleh berbagai aktor sering kali bersifat tumpang tindih atau bahkan tidak saling terkait. Masyarakat menerima berbagai pesan tentang kebersihan dan pengelolaan sampah dari sumber yang berbeda, tetapi tanpa kerangka narasi bersama yang jelas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebingungan dan melemahkan daya dorong pesan terhadap perubahan perilaku. Temuan ini mengindikasikan perlunya strategi komunikasi yang terkoordinasi dan berbasis jejaring lintas aktor.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan opinion leader dalam penanganan masalah sampah di Kota Banjarmasin masih belum optimal, meskipun para aktor tersebut memiliki legitimasi sosial dan potensi pengaruh yang kuat di lingkungannya masing-masing. Kondisi ini menegaskan bahwa keberadaan opinion leader tidak secara otomatis menghasilkan perubahan perilaku kolektif apabila tidak didukung oleh struktur komunikasi yang konsisten dan mekanisme kelembagaan yang memadai. Hal ini sejalan dengan pandangan Manopo (2013) dan Jaya dan Silviani (2020) yang menekankan bahwa efektivitas opinion leader sangat ditentukan oleh intensitas, konsistensi, serta kemampuan mereka mengarahkan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam konteks isu lingkungan, temuan penelitian ini juga memperkuat hasil studi Islamy dan Engriani (2025) serta Pesuwaryantoro (2025) yang menunjukkan bahwa pengaruh key opinion leader dapat mendorong niat perilaku ramah lingkungan, tetapi tidak selalu berujung pada tindakan nyata. Di Kota Banjarmasin, opinion leader cenderung berfokus pada pembentukan kesadaran dan sikap positif, sementara aspek tindakan kolektif belum menjadi perhatian utama. Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa pengaruh sosial yang bersifat normatif perlu dilengkapi dengan instrumen praktis dan dukungan sistem agar mampu mendorong perubahan perilaku yang konkret.

Strategi komunikasi yang digunakan opinion leader di Banjarmasin sangat dipengaruhi oleh konteks budaya lokal yang menghindari pendekatan menggurui. Tokoh agama dan tokoh masyarakat lebih memilih komunikasi persuasif dan simbolik dengan mengaitkan isu sampah pada nilai moral dan religius. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Setiawan dan Arli (2024) serta Ramadaniar et al. (2024) yang menegaskan bahwa nilai spiritual dapat memperkuat sikap dan niat perilaku ramah lingkungan. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan kultural tersebut memiliki keterbatasan ketika tidak diikuti dengan ajakan yang jelas dan berulang. Akibatnya, pesan

lingkungan cenderung berhenti pada ranah kesadaran dan belum membentuk kebiasaan baru dalam pengelolaan sampah.

Fenomena rendahnya partisipasi masyarakat meskipun tingkat kesadaran relatif tinggi menunjukkan adanya *collective action problem*. Banyak warga memahami bahwa sampah merupakan masalah serius, tetapi masih memandang pengelolaannya sebagai tanggung jawab utama pemerintah. Kondisi ini sejalan dengan temuan Muhaimin dan Jumriani (2023) serta Swandayani dan Juariyah (2019) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sering kali bersifat reaktif dan situasional. Dalam perspektif jejaring sosial, kondisi tersebut menunjukkan belum berfungsinya opinion leader sebagai aktor penghubung (*bridging actors*) yang mampu menjembatani berbagai kelompok sosial dan mendorong aksi kolektif lintas komunitas (Crano, Brewer, & Lac, 2014).

Peran komunitas dan relawan lingkungan dalam penelitian ini menunjukkan potensi signifikan dalam membangun praktik pengelolaan sampah di tingkat lokal. Melalui pendekatan partisipatif dan keterlibatan langsung, relawan mampu mendorong perubahan perilaku pada kelompok masyarakat tertentu. Namun, keterbatasan sumber daya dan lemahnya dukungan kelembagaan membatasi jangkauan serta keberlanjutan dampak yang dihasilkan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Maulidya et al. (2021) dan Rifani et al. (2022) yang menegaskan bahwa inisiatif berbasis komunitas memerlukan dukungan sistem dan kebijakan agar dapat berkembang menjadi gerakan yang lebih luas dan berkelanjutan.

Sementara itu, influencer digital berperan penting dalam meningkatkan visibilitas isu sampah dan membangun opini publik, terutama di kalangan generasi muda. Namun, keterlibatan mereka bersifat temporer dan sangat bergantung pada momentum isu. Penelitian ini memperkuat temuan Hasna (2025) serta Hidayat et al. (2022; 2024) yang menunjukkan bahwa aktivisme digital efektif dalam membangun kesadaran, tetapi belum mampu secara konsisten mendorong aksi kolektif di dunia nyata. Ketiadaan integrasi antara advokasi digital dan aksi komunitas menyebabkan potensi pengaruh influencer belum termanfaatkan secara optimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan opinion leader dalam penanganan masalah sampah di Kota Banjarmasin telah berlangsung, namun belum optimal dalam mendorong perubahan perilaku kolektif masyarakat. Tokoh agama, tokoh masyarakat, relawan lingkungan, dan influencer digital memiliki peran masing-masing dalam membangun kesadaran publik, tetapi kontribusi mereka masih bersifat parsial, sporadis, dan belum terintegrasi secara

sistematis. Keterlibatan opinion leader cenderung berfokus pada pembentukan kesadaran dan sikap normatif, sementara aspek tindakan kolektif yang berkelanjutan masih lemah.

Strategi komunikasi yang digunakan opinion leader umumnya bersifat persuasif, simbolik, dan sensitif terhadap konteks budaya lokal yang menghindari pendekatan menggurui. Pendekatan ini efektif dalam menjaga penerimaan sosial, namun kurang kuat dalam mendorong perubahan perilaku nyata karena pesan jarang disampaikan secara terstruktur, berulang, dan disertai panduan tindakan yang jelas. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara tingkat kesadaran masyarakat terhadap masalah sampah dan partisipasi aktif dalam pengelolaannya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa fragmentasi jejaring sosial dan lemahnya dukungan kelembagaan menjadi hambatan utama dalam optimalisasi peran opinion leader. Komunitas dan relawan lingkungan menunjukkan inisiatif yang relatif lebih konkret di tingkat lokal, tetapi jangkauan dan keberlanjutan kegiatannya dibatasi oleh keterbatasan sumber daya dan minimnya integrasi dengan program pemerintah. Sementara itu, influencer digital berperan signifikan dalam meningkatkan visibilitas isu sampah di ruang daring, namun keterlibatannya bersifat temporer dan belum terhubung secara efektif dengan aksi komunitas di tingkat lapangan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian komunikasi lingkungan dan opinion leadership dengan menunjukkan bahwa legitimasi sosial opinion leader tidak secara otomatis menghasilkan perubahan perilaku kolektif. Temuan penelitian menegaskan pentingnya melihat opinion leader tidak hanya sebagai penyampai pesan, tetapi sebagai aktor penghubung (*bridging actors*) dalam jejaring sosial yang mampu mengintegrasikan berbagai kelompok dan kepentingan. Selain itu, penelitian ini menguatkan literatur tentang *collective action problem* dalam isu lingkungan perkotaan, khususnya pada konteks masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran tinggi tetapi partisipasi rendah.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi bagi pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin. Pertama, pemerintah daerah perlu melibatkan opinion leader secara lebih sistematis sebagai mitra strategis dalam komunikasi kebijakan lingkungan, bukan sekadar sebagai pendukung informal. Kedua, strategi komunikasi lingkungan perlu dirancang secara terstruktur dan berkelanjutan, dengan mengombinasikan pendekatan kultural, nilai religius, dan ajakan tindakan yang konkret. Ketiga, diperlukan penguatan jejaring kolaborasi antara pemerintah, komunitas, relawan, dan influencer digital agar pesan lingkungan saling menguatkan dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Dengan integrasi yang lebih kuat antara aktor formal dan informal, serta

dukungan kelembagaan yang berkelanjutan, peran opinion leader diharapkan tidak hanya meningkatkan kesadaran publik, tetapi juga mendorong terbentuknya tindakan kolektif yang mendukung pengelolaan sampah yang partisipatif dan berkelanjutan di Kota Banjarmasin.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim peneliti mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pengerjaan penelitian ini. Secara khusus tim peneliti berterimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendanai penelitian ini melalui skema PDWM tahun 2025.

REFERENSI

- Amelia, R. N. (2024, September 3). *Permasalahan Sampah Pada Lingkungan yang Ada di Kota Banjarmasin*. KOMPASIANA. <https://www.kompasiana.com/rizkynooramelia/66d7306334777c133f6f7912/permasalahan-sampah-pada-lingkungan-yang-ada-di-kota-banjarmasin>
- Bagian Pembangunan Setdako Banjarmasin. (2025). *Gerakan Gaya Hidup Sadar Sampah Kota Banjarmasin*. <https://pembangunan.banjarmasinkota.go.id/2025/02/gerakan-gaya-hidup-sadar-sampah-kota.html>
- Crano, W. D., Brewer, M. B., & Lac, A. (2014). *Principles and methods of social research*. Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315768311/principles-methods-social-research-william-crano-marilynn-brewer-andrew-lac>
- Cresswell, J. W. (2017). *Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Gamson, W. A., Croteau, D., Hoynes, W., & Sasson, T. (1992). Media Images and the Social Construction of Reality. *Annual Review of Sociology*, 18(Volume 18, 1992), 373–393. <https://doi.org/10.1146/annurev.so.18.080192.002105>
- Hasna, S. (2025). *Aktivisme Digital Warganet Muhammadiyah dalam Menyuarakan Isu Krisis Iklim dan Lingkungan Pada Tagar #Milad111Muhammadiyah* (No. 1). 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.38194/jurkom.v8i1.1160>
- Islamy, S. S., & Engriani, Y. (2025). Pengaruh Key Opinion Leaders Review Terhadap Green Purchasing Intention Dengan Green Trust Sebagai Variabel Mediasi Di Kalangan Generasi Z Pada Green Beauty Product Avoskin di Kota Padang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 2926–2937.

- Jaya, A., & Silviani, I. (2020). PERAN KOMUNIKASI OPINION LEADER DALAM MENINGKATKAN ELEKTABILITAS CALON KEPALA DAERAH DI SUMATERA UTARA. *MESSAGE: JURNAL KOMUNIKASI*, 9(1), Article 1.
- Manopo, G. J. (2013). PERANAN OPINION LEADER DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MENUNJANG PROGRAM BERSIH ECENG GONDOK DANAU TONDANO. *ACTA DIURNA KOMUNIKASI*, 2(1), Article 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/963>
- Maulidya, S., Fauziah, N., & Nurhaliza, W. O. S. (2021). Komunikasi Lingkungan Komunitas Bank Sampah Wijaya Kusuma Dalam Meningkatkan Semangat Peduli Lingkungan. *Verba Vitae Unwira*, 2(2), Article 2.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Muhaimin, M., & Jumriani, J. (2023). Analisis Permasalahan Sampah Rumah Tangga di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin. *ASANKA: Journal of Social Science and Education*, 4(1), 34–43.
- Pesuwaryantoro, I. (2025). Pengaruh Komunikasi Key Opinion Leader (KOL) terhadap Reverse Vending Machine (RVM) di Universitas Terbuka guna meningkatkan Partisipasi User Menuju UT Green Campus. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(2), 1132–1141. <https://doi.org/10.46799/jsa.v6i2.2111>
- Ramadaniar, P., Kuswanti, A., & Muqsith, M. A. (2024). Peran Perempuan sebagai Opinion Leader di Pesantren dalam Menghadapi Kerentanan Pangan Akibat Krisis Iklim. *Publish: Basic and Applied Research Publication on Communications*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.35814/publish.v3i2.7683>
- Rifani, A., Mandari, A. F., Fitri, R., & Wardiah, I. (2022). Sistem Pengelolaan Bank Sampah Berbasis Web Pada Yayasan Bina Insan Madani Banjarmasin. *Prosiding SISFOTEK*, 6(1), 185–193.
- Setiawan, G., & Arli, D. (2024). The effect of opinion leadership and spirituality on recycling intention: Insights from attractive, expert and religious influencers. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 36(8), 1946–1965.
- Sukhrowardi. (2025). *Darurat Sampah Di Kota Banjarmasin, Apa Yang Harus Dilakukan Pemkot ?* <https://kalimantanpost.com/2025/04/darurat-sampah-di-kota-banjarmasin-apa-yang-harus-dilakukan-pemkot/>
- Swandayani, A., & Juariyah, J. (2019). Opini Masyarakat Desa Kertosari Jember Seputar Perubahan Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPA) Menjadi Objek Wisata Edukatif. *MEDIAKOM*, 2(2), 147–158.

- Treviño, L. K., Webster, J., & Stein, E. W. (2000). Making Connections: Complementary Influences on Communication Media Choices, Attitudes, and Use. *Organization Science*, 11(2), 163–182. <https://doi.org/10.1287/orsc.11.2.163.12510>
- Yulianus, J. (2025a). *Pemimpin Berganti, Sampah Masih Saja Jadi Masalah di Banjarmasin*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/pemimpin-berganti-sampah-masih-saja-jadi-masalah-di-banjarmasin>
- Yulianus, J. (2025b). *Ratusan Ton Sampah Tidak Terangkut di Banjarmasin*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/tpas-ditutup-kota-banjarmasin-darurat-sampah>